

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Kepegawaian dalam Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis di BKPSDM Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pelaksanaan mutasi dan promosi kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis yaitu merit system, seniority sistem dan spoil sistem. Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Seniority sytem adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Spion System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan asas kekeluargaan. Sistem ini berdasarkan kedekatan/berunsur politik. Pada pelaksanaan mutasi dan promosi, BKPSDM Kabupaten Ciamis menggunakan model merit system dalam kebijakan penempatan perpindahan dan peningkatan posisi jabatan pegawainya. Dengan model merit system proses pelaksanaan mutasi dan promosi akan lebih transparansi dan objektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu.

2. Upaya meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis adalah dengan: 1) menerapkan sistem pengendalian gratifikasi dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis dan mewujudkan *good governance and clean government* yang amanah, transparan, dan akuntabel. 2) Membangun digital mindset ASN terhadap pelayanan publik. BKPSDM Kabupaten Ciamis perlu membuat perubahan mindset yang kuat bahwa digitalisasi membawa kemudahan dalam pelayanan dan terkait dengan perubahan pola kerja tatanan baru, di mana pekerjaan birokrasi juga sudah beralih ke *digital based* dan struktur organisasi juga sudah mulai bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi. 3) Penataan kembali kelembagaan/organisasi. Sebagai upaya dan langkah yang BKPSDM Kabupaten Ciamis ambil sebagai peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, penataan tersebut merupakan agenda reformasi birokrasi yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian kelembagaan karena dapat tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Serta dalam agenda reformasi regulasi itu harus tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Kabupaten Ciamis sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam merealisasikannya dengan ketersediaan sumber daya yang ada. 4) Peningkatan Pengetahuan dan

- Keterampilan Pegawai sebagai upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Ciamis dengan memberikan penugasan kepada para ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajarnya. Kemudian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) Sasaran diklat PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan. Upaya ini dapat meminimalisir hambatan yang sering ditemui dari beberapa pegawai yang tidak semangat dalam bekerja, menurunnya disiplin kerja, dan tingkat absensi yang tinggi.
- Kemudian 5) Perbaiki sistem reward and punishment. Dengan sistem reward dan punishment ini menjadi cara terbaik untuk mengatur pegawai sehingga Instansi akan adil memperlakukan pegawainya. Pegawai akan dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi pegawai yang berprestasi dan mendapatkan reward sedangkan pemberian punishment adalah suatu sanksi atau hukuman untuk para ASN yang melanggar peraturan yang berlaku. Hukuman diberikan karena karyawan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya atau melanggar peraturan selama bekerja.
3. Model pelaksanaan mutasi dan promosi kepegawaian dalam peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis yaitu model pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan merit system. Pengambilan keputusan mutasi dan promosi ini dilakukan oleh pimpinan

baik pimpinan SKPD yang mengusul maupun Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah yang mengambil keputusan akhir dalam proses mutasi pegawai tersebut. Ada beberapa tahapan yang sudah BKPSDM Kabupaten Ciamis tempuh dalam proses pelaksanaan mutasi dan promosi dalam peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintahan yaitu BKPSDM menginventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatan melalui pejabat yang membidangi Mutasi Kepegawaian. Kedua, lowongan formasi jabatan struktural yang ada diinformasikan kepada seluruh pimpinan SKPD, melalui surat edaran yang ditujukan kepada kepala SKPD. Ketiga, berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, kepala SKPD mengusulkan nama-nama calon pejabat yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan struktural sesuai dengan formasi yang tersedia di SKPD dan disampaikan kepada kepala daerah melalui BKPSDM. Keempat, pada tahapan ini seleksi dilakukan oleh Tim Baperjakat untuk menentukan kualifikasi pegawai yang bersangkutan. Hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Tim Baperjakat ini memegang kunci pokok, karena apabila seleksi dilakukan dengan kurang tepat maka akan berpengaruh kepada kualitas kerjanya. Setelah didapati calon pegawai yang tepat mengisi jabatan selanjutnya adalah penerimaan SK dari Bupati.

Dan dalam pelaksanaan penjaringan dan penilaian oleh Tim Penilai sangat membantu BKPSDM dalam memunculkan pegawai yang dianggap memiliki potensi dan kompetensi, dimana dengan adanya penjaringan ini maka kompetensi setiap pegawai akan terlihat. Dan dalam proses

pelaksanaan promosi jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak hanya memilih pegawai yang berkompeten, tetapi dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan pejabat baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional merupakan faktor penting dalam perencanaan sumber daya manusia, Mutasi dan promosi sebagai peningkatan kapasitas birokrasi terlebih dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap permasalahan mengenai Model Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Kepegawaian dalam Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis di BKPSDM Kabupaten Ciamis, peneliti dapat memberikan rekomendasi:

1. Diharapkan BKPSDM Kabupaten Ciamis untuk konsisten dalam melaksanakan prinsip-prinsip merit sistem yaitu pendidikan dan pelatihan, keterampilan, pengalaman, masa kerja dan etika dalam kebijakan penempatan ASN. Kemudian perlu memperhatikan regulasi Undang-Undang yang mengatur tentang sistem kepegawaian dan pola pengembangan karir ASN, pemberian sanksi tegas bagi daerah yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan efek jera apabila ada pihak-pihak yang ingin mencoba melakukan kecurangan. Oleh karena itu, diharapkan agar pelaksanaan mutasi dan promosi kepegawaian senantiasa dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar upaya yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas birokrasi berjalan optimal yaitu harus adanya peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai yang menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kompetensi, kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik yang andal.
3. Diharapkan Tim seleksi jabatan harus betul-betul memperhatikan latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika ingin menempatkan seorang (ASN) disebuah unit kerja tertentu agar mampu bekerja lebih professional sehingga dapat meningkatkan kapasitas birokrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam roda pemerintahan di Kabupaten Ciamis. Dan setiap pelaksanaan mutasi dan promosi harus benar-benar berdasarkan kajian dari BAPERJAKAT yang objektif.